BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kemiskinan Nelayan

Nelayan adalah salah satu yang diidentifikasikan sebagai masyarakat miskin. Contoh kasus di Teluk Jakarta yang merenggut ruang gerak para nelayan pinggir pantai untuk melaut dan belum lagi dampak masalah lingkungan yang ditimbulkan nantinya dalam proyek "Reklamasi" Teluk Jakarta. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Mengare khususnya masyarakat nelayan Tajung Widoro bahwa terjadinya persaingan teknologi alat tangkap yang menyebabkan kerusakan lingkungan bawah laut dan biota laut menjadi terancam punah. Belum lagi adanya pembangunan pelabuhan baru di Manyar, Kabupaten Gresik ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak di areal tangkap nelayan tradisional.

Masyarakat nelayan pedesaan di negara yang sedang berkembang merupakan masalah yang cukup rumit, meskipun kebanyakan negaranegara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi dan politik. Masalah pokok bagi mereka adalah bagaimana agar mereka tetap hidup. Namun dalam skala ekonomi pedesaan masyarakat pesisir masih terbilang belum ada perubahan secara signifikan. Ada empat tanda-tanda kemiskinan, yaitu mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki faktor produksi, seperti tanah yang cukup, modal ataupun

keterampilan. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Tingkat pendidikan umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar.¹⁹

Pada masalah yang terjadi di masyarakat pesisir Ujung Indah bahwasannya, tidak semua nelayan memiliki alat produksi, baik itu alat tangkap maupun kapal untuk melaut. Mereka ini lah yang disebut sebagai nelayan buruh. Mereka mengandalkan alat tangkap dan kapal sewaan dari nelayan pemilik untuk dapat melaut guna memenuhi kebutuhan seharihari. Pada umumnya memang mereka termasuk yang berpendidikan rendah, yaitu hanya lulusan setingkat SMP dan ada juga yang hanya sampai tamatan SD.

Salah satu tolok ukur masyarakat nelayan ini adalah sebagai masyarakat miskin adalah mereka selalu harus menghadapi iklim yang berubah-ubah yang menyebabkan penghasilan mereka tidak stabil atau bahkan minim, oleh karenanya mereka harus mampu bertahan hidup dengan situasi alam yang berubah-ubah. Belum lagi jika mereka sendiri tidak memiliki mesin kapal atau alat produksi sendiri, dengan kata lain mereka hanya bisa bergantung pada yang memiliki modal besar ataupun yang memiliki alat produksi. Maka mereka sebagai non-pemilik alat produksi harus membagi hasil tangkap ikan kepada pemilik alat produksi tersebut.

¹⁹ Jamaluddin Hos dan Muhammad Arsyad, *Faktor-Faktor Kemiskinan Keluarga Nelayan Di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan*, dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi; Volume 1, No. 1, April 2014, hal 57.

Menurut Departemen Sosial, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo per kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.²⁰

Menilik dari beberapa artikel cendikia dan beberapa buku, faktorfaktor yang menjadi penyebab kemiskinan pada komunitas nelayan adalah;
(a) secara teknis, (b) secara struktural (c) secara kultural. Persoalan kemiskinan pada masyarakat nelayan ini memang tidak lepas dari masalah yang ditimbulkan oleh nelayan itu sendiri. Secara teknis masalah yang ditimbulkan ialah sistem pola tangkap nelayan, baik dengan tangan kosong, menggunakan tombak maupun jaring. Salah satu masalah yang ada di Desa Tajung Widoro banyaknya nelayan yang selalu mengeluhkan mengenai penangkapan ikan dengan sistem pola tangkap ikan modern yang membuat kelompok nelayan Tajung Widoro tidak berdaya dalam menyelesaikan permasalahan yang terus terjadi.

-

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 34.

Keppres 39 tahun 1980²¹, meskipun berpihak terhadap nelayan tradisional, namun dibalik adanya peraturan yang telah ada justru mala mengaburkan tentang pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut. Menteri kelautan mengijinkan penggunaan secara terbatas oleh nelayan modern dalam menggunakan trawl dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Ringkihnya birokrasi akibat penyimpangan - penyimpangan di tingkat operasional justru melemahkan kohesi sosial di pedesaan pantai dengan pengelompokan nelayan "pro" dan "kontra" atau nelayan modern dan tradisional. Selama konflik terjadi pun, nelayan tradisional seperti tidak mendapat keamanan dari pihak keamanan kelautan perihal konflik teknologi alat tangkap tersebut. Mala yang ada mereka merasa dianak tirikan. Dengan kata lain aparat keamanan laut seakan melindungi atau membentenginelayan modern yang menggunakan trawl.

Dalam mengentas kemiskinan nelayan, nelayan selalu dijadikan sebagai objek pembangunan dimana yang selalu mengatasnamakan revolusi biru melalui program bantuan atau yang lainnya, hanya sekedar harapan perbaikan produktivitas nelayan dan objek yang harus selalu berpartisipasi. Realitas yang suram mengenai masyarakat nelayan adalah menjadi sasaran kemiskinan yang memang sudah terskrip oleh kebijakan

²¹ Tgl 1 juli 1980 Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 39 Tahun 1980 yang melarang pengoperasian pukat trawl dan sejenisnya diwilayah kelautan Indonesia.

pemerintah itu sendiri dan ketidakberdayaan mereka sebagai masyarakat kalangan bawah yang selalu terbelenggu dan tertindas.

Munculnya konflik terbuka yang ditimbulkan dari sistem pola tangkap nelayan modern yang menggunakan mini trawl membuat perpecahan antara kohesi sosial internal nelayan yang banyak menimbulkan korban dan kerugian diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi dari segi pengalaman dan pengetahuan mengenai gejala alamiah dan perairan dan potensi sumber daya perikanan. Agar terhindar dari segala kebijakan birokratis yang mengutamakan pertumbuhan produksi dengan mengandalkan teknologi eksploitatif dan destruktif. Dengan menganalisis dan memetakan bagaimana keadaan nelayan yang seyogyanya tidak memiliki latar belakang pengetahuan dari proses alih ilmu teknisi secara formal. Selama ini nelayan hanya mengandalkan berdasarkan kemampuan mengaplikasikan teknologi berkaitan dengan pengalaman berinteraksi sesama nelayan (learning by doing). Pengetahuan tradisionalnya tentang ekologi kelautan, merupakan bagian dari kehidupan mereka yang sifatnya turun temurun.

Kemudian kesenjangan yang terjadi antara nelayan buruh dengan nelayan pemilik yang biasa disebut sebagai *juragan*. Relasi antara pemilik alat produksi dan non pemilik akan sangat menguntungkan secara sepihak, terjadinya dominasi relasi hubungan sosial ekonomi dan konsekuensi yang di terima oleh non pemilik. Hal ini biasanya didasari oleh monopoli

pemilik alat produksi dalam menentukan sistem bagi hasil, pemasaran dan nilai harga ikan dari hasil tangkapan. Inilah yang menjadikan nelayan non pemilik menjadi selalu terpuruk dan tidak berdaya atas ketidakmilikan kuasa tersebut. Konsekuensi ini dari hubungan yang tidak seimbang antara nelayan pemilik dan non pemilik tersebut berhubungan dengan melebarnya selisih pendapatan (biasanya terjadi di antara kalangan juragan sebagai nelayan pemilik kapal sewaan, juru mudi kapal, dan kru nelayan tersebut dan matriks perbandingan rata-rata pendapatan nelayan kisaran 60:40).²²

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan si miskin untuk bekerja atau malas, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural ini adalah pemerintah, karena pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jika pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan.

²² Hasil wawancara dengan Pak Hamzah pada Rabu 07 Desember 2015 14.45 WIB.

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, hal. 56.

Sedangkan kemiskinan kultural menurut Lewis²⁴merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sikap apatis, curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas. Kebudayaan kemiskinan biasanya merupakan efek domino dari belenggu kemiskinan struktural yang menghinggap masyarakat terlalu lama, sehingga membuat masyarakat apatis, pasrah, berpandangan jika sesuatu yang terjadi adalah takdir, dalam konteks keagamaan disebut dengan paham *Jabariah*, terlebih paham ini disebarkan dan di indoktrinasikan dalam mimbar agama.

Menurut Ritzer dan Goodman dalam buku Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir adalah suatu upaya terkenal yang mengintegrasikan agen-struktur adalah teori strukturasi Giddens, dan ia mengatakan bahwa "Setiap riset sosial atau sejarah selalu menyangkut penghubungan tindakan (seringkali disinonimkan dengan agen) dengan struktur, namun dalam hal ini tidak berarti bahwa struktur menentukan tindakan atau sebaliknya." Teori strukturasi Giddens²⁵ adalah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Dengan demikian agen dan struktur tidak bisa dipahami pada salah satu dimensi nya saja. Mereka diibaratkan sebagai dua sisi dari satu mata uang logam. Agen dan struktur

_

²⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, hal. 32.

²⁵ Edi Susilo, *Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010), hal. 14

adalah dwi-tangkap, seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur disini memiliki sinergi yang kuat terhadap praktik dan aktivitas kemanusiaan nya.

ketimpangan Kesenjangan ekonomi ... atau dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Persoalan kemiskinan yang menimpa masyarakat nelayan, disebabkan oleh faktorfaktor yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial.²⁶ bersifat Dalam pembangunan yang konteks berbangsa,bermasyarakat dan bernegara, kemiskinan merupakan hasil dari sebuah proses sosial.

Orang miskin merupakan kaum tertindas, proletar yang dihisap, yang hasil-hasil kerja mereka dicuri dan kemanusiannya di injak-injak. Kemiskinan bukanlah suatu panggilan jiwa untuk tindakan seorang individu yang murah hati, melainkan suatu tuntutan dan tindakan kolektif untuk mendirikan tatanan sosial baru yang membebaskan manusia dari berbagai belenggu.²⁷

Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan atas rendahnya kualitas pendidikan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Kemiskinan

²⁶ Kusnadi, *Membela Nelayan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.18.

²⁷ Kusnadi, *Membela Nelayan...*, hal 18.

itu sendiri didefinisikan sebagai situasi serba kekurangan dari penduduk yang disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktifitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Dikutip dalam sebuah hadits, dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah SAW., bersabda;

"Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran." (H.R. At Thabrani).²⁸

Dalam dakwah Islam, kemiskinan merupakan persoalan yang harus diperhatikan dan dicarikan upaya pemecahannya. Sebab nyaris saja kemiskinan itu rentan terjerumus pada kekafiran atau kekufuran. Berbeda halnya dengan pandangan Islam, yang melihat fakta kefakiran/kemiskinan sebagai perkara yang sama, baik di Eropa, AS maupun di negeri-negeri Islam. Bahkan, pada jaman kapan pun, kemiskinan itu sama saja hakikatnya. Oleh karena itu, mekanisme dan cara penyelesaian atas problem kemiskinan dalam pandangan Islam tetap sama, hukumhukumnya *fixed*, tidak berubah dan tidak berbeda dari satu negeri ke negeri lainnya. Islam memandang bahwa kemiskinan adalah fakta yang dihadapi umat manusia, baik itu muslim maupun bukan muslim.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh.

_

²⁸ Imam Ath Thabarani, *Kitab Al Mu'jamul Al Ausath*, (Yogyakarta: Teras, 2009), cet. 4 Bab 225, hal. 4044.

Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dengan demikian, siapa pun dan di mana pun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer)nya, yaitu sandang, pangan, dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh karena itu, setiap program pemulihan ekonomi yang ditujukan mengentaskan fakir miskin, harus ditujukan kepada mereka yang tergolong pada kelompok tadi. Baik orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara yang makruf, yakni fakir, maupun yang tidak memiliki pekerjaan karena PHK atau sebab lainnya, yakni miskin.

Jika tolok ukur kemiskinan dalam Islam dibandingkan dengan tolok ukur lain, maka akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolok ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tolok ukur lain. Sebab, tolok ukur kemisknan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yaitu pangan, sandang, dan pangan. Adapun tolok ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai

kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat ada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki dua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupannya tidak sejahtera. Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment*.²⁹

Proses pemberdayaan masyarakat mengutamakan desentrialisasi. dimanifestasikan Desentralisasi tersebut terutama dalam bentuk kewenangan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan dan sumberdaya. Dengan demikian pendekatan pemberdayaan memberikan kewenangan kepada masyarakat sampai tingkat komunitas serta lokal dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, juga pelaksanaan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat harus mengutamakan alur dari bawah keatas (*Bottom-Up*). Dimana inisiatif pembangunan berasal dari masyarakat. pendekatan ini bertumpu pada paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*People centered development*). Paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek. Melainkan

²⁹ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 88.

sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumberdaya, dan mengarahkan proses yang memengaruhi kehidupannya. Pendekatan pembangunan ini menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan masyarakat setempat.³⁰

Proses pengelolaan pembangunan oleh masyarakat sendiri dan tindakan bersama untuk peningkatan kehidupan bersama yang merupakan rutinitas kemudian akan diakui keberadaannya, dirasakan manfaatnya dan ditempatkan sebagai bagian dari pola tindakan bersama. Dengan demikian yang terjadi bukan ketergantungan, melainkan keberlanjutan pembangunan.

C. Konsep Pemberdayaan Perempuan Nelayan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "Empowerment", yang biasa diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya,

-

³⁰ Rislima F. Sitompul, *Merancang Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan dengan Pendekatan System Dynamics*.(Jakarta: LIPI Press, 2009), hal. 22-23.

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan dalammencapai penguatan diri untuk meraih keinginan yang dicapai. Pemberdayaan akan melahirkan suatu kemandirian masyarakat, baikkemandirian berfikir, sikap, maupun tindakan yang pada akhirnya mampu memunculkan sebuah kehidupan yang lebih baik.

Untuk itu perlu adanya kesadaran yang kritis dalam menyikapi masalah sosial ekonomi nelayan tersebut, sehingga dengan pendampingan masyarakat berbasis partisipatif akan membuka kesadaran mereka akan kemandirian yang selama ini mereka tinggalkan. Hal ini mengacu pada pernyataan Alimandan dari teori sosiologi modern³¹yang mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang aktif menciptakan kehidupannya sendiri yaitu kreatif, aktif dan evaluaitif dalam memilih dari berbagai alternatif tindakan dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Sasaran dari tujuan pemberdayaan masyarakat bisa dari subjek mana saja, salah satunya adalah pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan yang menjadi fokus dan kurang mendapat perhatian adalah perempuan pesisir, seperti yang terjadi di Desa Tajung Widoro.

.

³¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, "*Teori Sosiologi Modern*", terjemahan Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 75.

Kemiskinan yang identik dengan masyarakat pesisir masih menghantui para perempuan pesisir. Tidak jarang banyak dari mereka yang hanya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga atau sebagai pembuat kerupuk ikan hasil olah sendiri. Perempuan memiliki peran yang penting dalam perekonomian masyarakat pesisir namun hal tersebut harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan atau bisa dikatakan dengan pendidikan yang cukup dan juga dibekali dengan keterampilan. Hal ini sangat disayangkan karena peran perempuan-perempuanpesisir hingga saat ini masih terabaikan. Seharusnya pada era yang sudah maju seperti sekarang perempuan pesisir sudah bisa menikmati hasil dari perjuangan Ibu Kartini. Sosok perempuan nelayan adalah salah satu gambaran realita dan seharusnya tidak hanya nelayan saja yang diperhatikan namun para perempuan pesisir atau isteri-isteri nelayan juga menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan.

Jika saja para isteri-isteri nelayan diberikan pendidikan yang layak mereka akan mengetahui apa saja potensi yang ada didaerah pesisir tersebut dan bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa ada unsur eksploitasi berlebih. Dengan kata lain mereka memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya jika mereka mengeksploitasi sumber daya berlebih. Pendidikan sangat menunjang hal ini. Mengapa? Karena dari segi pendidikan mereka akan mendapatkan ilmu juga keterampilan untuk menjaga wilayah mereka yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dikelola. Dengan pendidikan mereka juga bisa membekali para nelayan

untuk tidak melakukan *overfishing* karena mereka sudah mengetahui sebab dan akibatnya. Banyak manfaat yang didapatkan dari memberikan pendidikan yang layak untuk perempuan pesisir atau perempuan nelayan.

Pada dasarnya keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan pencarian nafkah keluarga merupakan suatu hal yang biasa dan menjadi bagiandari perilaku budaya masyarakat nelayan.³² Pernyataan ini merupakan penegasan dari hasil riset sebelumnya tentang persepsi masyarakat nelayan terhadap peran publik perempuan pesisir yang bersifat kontekstual dinamis. Keterlibatan kaum perempuan dalam aktifitas ekonomi disektor publik tetap disertai tanggung jawab menyelesaikan urusan internal rumah tangga. Kedua tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara sinergis. Sebagai isteri nelayan, perempuan pesisir berkewajiban membantu suami mereka dan sebagai ibu rumah tangga, kaum perempuan ikut bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Peran demikian disadari sepenuhnya oleh isteri nelayan karena hasil tangkapan suami dari kegiatan melaut bersifat tidak pasti dari aspek perolehan dan tingkat pendapatan. Kemampuan adaptasi ini yang digunakan oleh rumah tangga nelayan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Yang dilakukan oleh para isteri nelayan adalah sebagai bentuk dari mata pencaharian alternatif bagi rumah tangga nelayan demi membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

D. Pengalaman-Pengalaman Pemberdayaan Perempuan Pesisir

-

³² Kusnadi, *Pemberdayaan Perempuan Pesisir*, (Jember: Graha Ilmu, 2015), hal. 98.

Sebagai satu kesatuan masyarakat nelayan menangkap ikan ke tengah laut. Dampak lebih lanjut adalah ketidakpastian dan penurunan tingkat pendapatan nelayan, serta produktifitas perikanan juga menurun secara keseluruhan. Salah satu adaptasi keadaan tersebut adalah dengan pemberdayaan perempuan pesisir, diantaranya;

 Pemberdayaan perempuan pesisir melalui budidaya rumput laut di Situobondo³³

Kelangkaan sumberdaya perikanan ini disamping karena penangkapan yang intensif dan berlebih (*overfishing*), juga disebabkan oleh meningkatnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta pencemaran limbah dari berbagai sumber. Dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2000-an perubahan iklim mempengaruhi usaha penangkapan nelayan dan usaha budi daya rumput laut. Berangsur-angsur sejak tahun 2000-an harga rumput laut terus membaik, sehingga kondisi demikian mendorong para nelayan khususnya para perempuan pesisir berpikir rasional dan melakukan pilihan rasional. Sehingga dibangunlah model pengembangan matapencaharian alternatif dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan rumah tangga nelayan.

Tabel 2.1 Model Pengembangan Matapencaharian Alternatif³⁴

Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

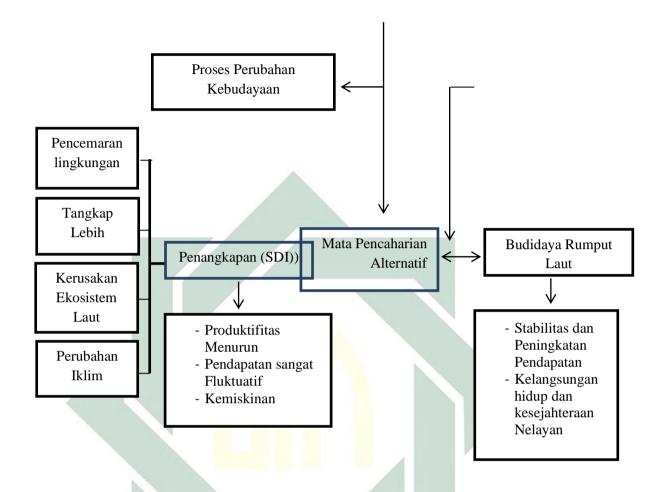
³³ Kusnadi, *Pemberdayaan Perempuan Pesisir...*, hal. 102.

³⁴ Kusnadi, Pemberdayaan Perempuan Pesisir..., hal. 115

⁻ Mudah dilakukan dan menguntungkan (pengetahuan, modal/biaya, pasar, saling bantu tenaga kerja)

Tidak punya keahlian kerja di darat

Tidak ada peluang kerja di darat



Pembinaan perempuan pengolah ikan asin di pesisir Muara Angke Jakarta Utara

Muara Angke merupakan sentra pengolahan ikan asin di Jakarta. Kegiatan usaha pengolahan ikan asin melibatkan hampir seluruh anggota keluarga, salah satunya adalah perempuan. Kontribusi perempuan dalam kegiatan usaha pengolahan ikan asin besar, tetapi dalam kegiatan penyuluhan kelompok perempuan pengolah jarang dilibatkan secara khusus. Umumnya kegiatan penyuluhan lebih banyak diikuti oleh kelompok laki-laki. Muara Angke merupakan sentra pengolahan ikan asin di Jakarta. Kegiatan

usaha pengolahan ikan asin melibatkan hampir seluruh anggota keluarga, salah satunya adalah perempuan. Kontribusi perempuan dalam kegiatan usaha pengolahan ikan asin besar, tetapi dalam kegiatan penyuluhan kelompok perempuan pengolah jarang dilibatkan secara khusus. Umumnya kegiatan penyuluhan lebih banyak diikuti oleh kaum lelaki.

Muara Angke merupakan sentra pengolahan ikan asin di Jakarta. Kegiatan usaha pengolahan ikan asin melibatkan hampir seluruh anggota keluarga, salah satunya adalah perempuan. Kontribusi perempuan dalam kegiatan usaha pengolahan ikan asin besar, tetapi dalam kegiatan penyuluhan kelompok perempuan pengolah jarang dilibatkan secara khusus. Umumnya kegiatan penyuluhan lebih banyak diikuti oleh kaum lelaki.

E. Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan Nelayan

Islam sangat menekankan pada keadilan di semua aspek kehidupan. Keadilan ini tidak akan tercipta tanpa membebaskan golongan masyarakat lemah dan masyarakat marginal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemimpin. Karena sejatinya semua manusia harus bisa memimpin dirinya sendiri untuk menciptakan sejarah dalam hidupnya. Hal ini juga tergambar pada kehidupan masyarakat Tajung Widoro terutama bagi masyarakat nelayan yang mengalami dampak adanya persaingan teknologi alat tangkap tersebut. Masyarakat mempunyai kesamaan hak dan kesempatan akan penyampaian aspirasi dan pendapatnya berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan

kehidupan sosial masyarakat. Setiap mereka adalah bagian dari masyarakatnya, dan diakui oleh sistem sosial setempat.

Al Quran juga memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk berjuang membebaskan golongan masyarakat lemah dan tertindas. ³⁵Dalam surat An-Nisa' ayat 75 telah dijelaskan sebagai berikut:

Artinya:

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!" (Q.S An Nisa' ayat 75).

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa kaum perempuan di izinkan untuk membantu perekonomian dalam keluarga dengan tujuan membebaskan dari golongan masyarakat lemah dan tertindas. Berkorban dan berjuang menambah penghasilan demi mencukupi kebutuhan seharihari di saat penghasilan suami tidak menentu. Dari keterbatasan ekonomi inilah mendorong kaum perempuan atau para isteri-isteri nelayan untuk bekerja dan membantu para nelayan mencari penghasilan.

Hal tersebut banyak dirasakan oleh perempuan pesisir yang ada di Indonesia. Ketidaksetaraan gender dalam masyarakat dan bertambahnya

³⁵ Agus Afandi, dkk., *Modul Participatory Action Research (PAR)*, (Surabaya: LPPM UIN Sunan Ampel, 2016), hal.27.

beban akibat dampak pembangunan yang tidak merata menjadikan perempuan di pesisir sulit keluar dari keterpurukannya. Harapan yang besar untuk perempuan pesisir agar lebih diperhatikan karena perempuan pesisir berperan dalam membawa perubahan bagi wilayah pesisirnya.

Artinya:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

(Q.S. Al Qashash ayat 77).

Dari Qur'an Surah diatas maknanya jangan sia siakan bahagiamu di dunia untuk menikmati barang yang halal dan jangan sia siakan usaha dan kepentinganmu untuk mendapatkan kebaikan dunia itu. Karena Allah telah menganugerahkan segala nikmat dan karunianya kepada hamba sesuai dengan porsi yang ditentukan. Seperti dalam kehidupan komunitas nelayan tradisional di Desa Tajung Widoro yang masih menggunakan alat tangkap tradisional (jaring sederhana) yang masih benar-benar menjaga kealamian dan kekayaan bawah laut. Namun sayangnya, adanya nelayan modern daerah Tuban dan Lamongan dan sekitarnya menyebabkan kerusakan ekosistem bawah laut di kawasan areal tangkap nelayan Tajung Widoro.

Ketika Allah memberikan kita semua kehidupan, kemudian Allah berikan kepada kita makna kebaikan. Kali ini Allah berikan petunjuk jalan menuju hidup yang bahagia tersebut. Allah memberikan cara mendapatkannya, tinggal kita sebagai manusia, mau atau tidak. Bagaimana untuk bersyukur dan menjaga apa yang telah Allah beri kepada kita. Lalu Allah berfirman dalam Al Qur'an yang berbunyi:

Artinya:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baikdan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

(Q. S. An Nahl ayat 97).

Sebagai isteri nelayan, perempuan pesisir berkewajiban membantu suami mereka dan sebagai ibu rumah tangga, kaum perempuan ikut bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Peran demikian disadari sepenuhnya oleh isteri nelayan karena hasil tangkapan suami dari kegiatan melaut bersifat tidak pasti dari aspek perolehan dan tingkat pendapatan. Kemampuan adaptasi ini yang digunakan oleh rumah tangga nelayan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Yang dilakukan oleh para isteri nelayan adalah sebagai bentuk dari mata pencaharian alternatif bagi rumah tangga nelayan demi membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.